

KLIPING

15

REPUBLIKA | KAMIS, 13 OKTOBER 2022

Anggaran Kebencanaan Bertambah Rp 400 Miliar

Sebanyak 3.250 KK di Mamuju dan Majene terdampak banjir tanah longsor.

■ ARIE LUKIHARDIANTI

BANDUNG — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, kementeriannya telah mendapat tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) kebencanaan sebesar Rp 400 miliar. Anggaran itu dipersiapkan untuk menghadapi bencana musim penghujan yang mulai banyak terjadi di beberapa daerah di Tanah Air dalam sepekan terakhir.

"Akhirnya, Kemenkeu sudah menyetujui kami dapat anggaran tambahan untuk bencana. Tambahannya Rp 400 miliar. Jadi kita punya *upper stock* ya. Mudah-mudahan *enggak* ada bencana besar," ujar Risma usai Wisuda Lulusan Program Magister Terapan dan Sarjana Terapan Poltek-sos Bandung di Gedung Sabuga ITB, Rabu (12/10).

Risma bersyukur, tahun ini ada dana tambahan untuk bansos bencana. Karena, tahun lalu, ia sempat mengambil sisa anggaran yang ada di Kemensos. "Sisa anggaran kita gunakan untuk tambahan bencana," katanya.

Menurut dia, realisasi bantuan kebencanaan sudah lebih cepat karena bekerja sama dengan daerah. Bahkan, hingga tingkat kecamatan ada lumbung-lumbung sosial. Masya-

rakat, kata dia, bisa langsung mengambil anggaran yang ada lumbung sosial. "Tapi masyarakat sudah mengerti langkah-langkah yang harus dikerjakan. Di Sintang Kecamatan Serawai, mereka sudah punya perahu boat. Yang Majene pun kami masih menanganai yang 2021," kata dia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Sabtu (8/10) memperkirakan, terjadi cuaca ekstrem pada periode 9-15 Oktober. Data BMKG menunjukkan, akan terjadi hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang di seluruh wilayah Indonesia. Cuaca ekstrem disebabkan oleh sirkulasi siklonik dan aktifitas fenomena gelombang atmosfer, seperti Madden Julian Oscillation (MJO) yang berinteraksi dengan gelombang Rossby Ekuatorial dan gelombang Kelvin. Fenomena tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan.

Sejak awal pekan, pemerintah daerah telah menyiagakan sejumlah langkah untuk menghadapi cuaca ekstrem tersebut. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada Senin (10/10) meminta BPBD Jabar siaga satu menanggulangi potensi bencana. Sejumlah wilayah di Jabar, seperti Kota Bandung dan Bogor telah dilanda

banjir sejak pekan lalu.

"Karena itu, BPBD dan perangkat-perangkat yang terkait dengan kebencanaan sudah di-briefing untuk siaga satu setiap hari," ujar Ridwan Kamil.

Di Sulawesi Barat, banjir dan tanah longsor kembali terjadi di Kabupaten Mamuju dan Majene dan Selasa (11/10) akibat hujan dengan intensitas tinggi sepanjang hari. Longsor memutus total jalur penghubung Majene dan Mamuju.

Hingga Rabu siang, total ada 3.250 kepala keluarga yang terdampak rendaman banjir dan tanah longsor. Sebanyak enam rumah hanyut terbawa arus dan lima rumah roboh dan rusak berat akibat tanah longsor.

Kapolda Sulawesi Barat Irjen Verdianto I Bitticaca menjamin warga terdampak banjir dan tanah longsor di dua kabupaten itu mendapatkan bantuan. "Kami pastikan warga terdampak banjir di Kabupaten Mamuju dan Majene akan mendapatkan bantuan," katanya saat memantau kondisi banjir di Mamuju, kemarin.

Polda Sulbar juga telah menerjunkan personel untuk membantu warga sejak banjir menerjang pada Selasa sore. Tim yang dikirim, kata Verdianto, adalah SAR dari Brimob Sulbar Direktorat Samapta dan Polresta Mamuju untuk melakukan evakuasi warga yang menjadi korban.

Petugas juga telah mendirikan kendaraan dapur lapangan (*randur-*

lap) Brimob Polda Sulbar mengevakuasi korban serta membantu pembersihan jalan dan rumah warga terdampak banjir dan tanah longsor. "Ada beberapa kepala keluarga yang memilih mengungsi di tempat aman atau di rumah keluarganya karena sebagian dari mereka tempat tinggalnya sudah tidak layak huni ataupun masih trauma," kata dia.

Tanggap darurat

Sementara itu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, hingga Rabu (12/10) masih terendam banjir. Pemerintah setempat telah menetapkan status tanggap darurat 14 hari untuk merespons bencana yang terjadi sejak Jumat (7/10).

"SK itu berlangsung selama 14 hari, terhitung dari 10-23 Oktober 2022," ujar Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari lewat keterangan tertulisnya, kemarin.

Menurut dia, status itu membuat pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber daya penanganan darurat bencana. BNPB mencatat, sebanyak 3.596 KK atau 11.419 jiwa yang tersebar di lima kecamatan terdampak banjir. "Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang mencatat sebanyak 30 KK atau 150 jiwa mengungsi sementara waktu," katanya.

■ antara ed: ilham tirta